

Upaya Menuntaskan Masalah Asongan

Oleh Muchdie



Pedagang asongan yang muncul sebagai bagian dari sektor informal di kota-kota besar sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari gagalnya sektor industri modern menampung limpahan tenaga kerja yang terlempar dari sektor pertanian, yang dianggap tradisonal itu. Bagi kaum migran yang tidak berhasil menembus sektor modern, kembali ke sektor pertanian hampir tidak mungkin. Jalan yang paling mudah adalah masuk ke sektor informal. Dengan sedikit modal dan keberanian melintas di tengah hiruk pikuknya arus lalu lintas, mereka boleh menyandang "profesi" sebagai pedagang asongan.

Semula, ketika resesi dunia ikut melanda perekonomian kita, kemunculan sektor informal dianggap sangat penting sebagai *katup penyelamat* dalam mengatasi masalah lapangan kerja. Keberadaan pedagang asongan dan sektor informal lainnya lantas mulai diakui. Sayangnya, karena pertumbuhannya yang semakin tidak terkendali sehingga menimbulkan kesan semrawut dan dianggap turut memberikan andil terhadap kemacetan lalu lintas dan berbagai kerawanan sosial lainnya, kemudian ditempuh upaya-upaya untuk penertibannya. Nah dari sinilah persoalan muncul.

Jakarta dengan *BMW*-nya sepertinya sangat *kewalahan*. Sementara kemampuan untuk menyediakan lapangan kerja sangat terbatas dan arus urbanisasi pun terus menderas, Jakarta juga ingin mempercantik diri. Supaya nampak bersih, manusiawi, dan berwibawa. Lebih-lebih menjelang *Visit Indonesia Year 1991*.

Pada bulan Juli 1989 yang lalu, masalah pedagang asongan ini dibahas dalam Rapat Pemda DKI. Rapat yang dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta, *Wiyogo Atmodarminto*, juga dihadiri oleh Ketua DPRD DKI, para Wakil Gubernur, Sekwilda serta Asisten-asisten Sekwilda itu berkesimpulan bahwa, bagi Jakarta, pedagang asongan sudah merupakan problema sosial yang bisa menimbulkan berbagi kerawanan. Adalah Menko Polkam *Sudomo* yang kemudian mengangkat persoalan tersebut dalam rapat tingkat Menko karena persoalan-persoalan yang dapat menimbulkan kerawanan sosial memang menjadi bidang tugasnya.

OEPH

Untuk mencoba mengatasi masalah asongan ini, Pak Domo kemudian merancang suatu proyek yang disebut *OEPH* (*Operasi Esok Penuh Harapan*). Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup pedagang asongan, serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Dana untuk proyek tersebut dihimpun dari para dermawan, termasuk mereka yang beruntung memperoleh hadiah SDSB.

Pelaksanaannya dibagi menjadi empat tahapan. *Pertama*, melakukan penjangkaran-penjangkaran para pedagang asongan dan sebagai proyek percontohan hanya dilakukan di Jalan Thamrin, dari Istana Negara ke Bunderan Hotel Indonesia. Tahapan ini mulai dilaksanakan sejak 16 Desember 1989. Pada tahap *kedua*, para pedagang asongan didata melalui kantor wali kota setempat. Yang masih usia sekolah diusahakan untuk memperoleh beasiswa. Yang ingin pulang kampung diberi ongkos pulang. Yang ingin beralih profesi diberi kesempatan untuk ikut kursus keterampilan di BLK (Balai Latihan Kerja). Yang masih ingin tetap berdagang diberi penerangan untuk tidak berdagang

di jalanan. Mereka akan ditempatkan di tempat-tempat yang diperkirakan masih tetap strategis seperti di halte-halte bus, halaman parkir, hotel dan perkantoran. Tahap ini dimulai sejak 15 Februari 1990 dan sejak saat itu para pedagang asongan dilarang berdagang di semua jalan raya. Pada tahap *ketiga*, yang dimulai sejak tanggal 5 Maret 1990, pada prinsipnya berupaya untuk menempatkan para pengasong di lokasi berdagang yang telah ditetapkan oleh para wali kota. Pada tahap *keempat*, yang dimulai sejak 10 Maret 1990, dilakukan pengamanan dan pembinaan selama lebih kurang empat bulan.

Yang menarik dari pelaksanaan *OEPH* ini adalah, walaupun sudah memasuki tahapan keempat, ternyata pedagang asongan tetap saja berkeliaran di jalanan. Upaya penertiban kemudian dilakukan dengan merujuk UU No 3/1965 tentang Lalu Lintas dan Perda No 11/1988 serta SKB (Surat Keputusan Bersama) antara Gubernur DKI, Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI dan Kapolda Metro Jaya. SKB tersebut, yang mulai diberlakukan sejak 7 Mei 1990 itu, pada intinya akan mengadili secara kilat para pengasong serta para pembelinya yang masih tetap membandel. Artinya, penanganan masalah asongan dilakukan melalui pendekatan hukum.

Alternatif lain

Dengan diterapkannya SKB tersebut, banyak pedagang asongan yang diadili. Ada yang didenda. Ada yang dihukum kurungan selama 3 hari berturut-turut. Ada yang barang dagangannya disita sebagai barang bukti dan ada juga yang mengajukan kasasi. Terlepas dari soal *pro* dan *kontra* terhadap upaya pengadilan kilat ini, kalau kita mau jujur, penanganan pedagang asongan dengan cara tersebut nampaknya besok kembali

mengasong. Bahkan ada semboyan pedagang asongan yang sepertinya agak menantang. "*Sekali mengasong tetap mengasong*", karena persoalannya memang menyangkut perut. Makanya tidak aneh kalau sekarang ini masih banyak saja pengasong yang berkeliaran di jalanan.

Penanggulangan masalah asongan melalui OEPH sebenarnya bukan melulu pendekatan hukum. Tapi karena aspek penertiban yang nampaknya sangat menonjol, di mana pengasong ditangkapi dan diadili, telah menimbulkan berbagai reaksi dari kalangan masyarakat sehingga cenderung mempertajam kerawanan sosial. Upaya ini juga dianggap tidak efektif. Karena memang masalahnya berakar dari dimensi permasalahan yang cukup rumit, seperti masalah tenaga kerja ataupun masalah sosial ekonomi lainnya. Oleh karenanya sangat beralasan kalau Bapak Presiden meminta agar dicari alternatif baru bagi penanganan masalah pedagang asongan ini. Agar masalahnya dapat diselesaikan secara lebih tuntas.

Mengubah pola

Siapa pun setuju kalau pedagang asongan yang berkeliaran di jalanan itu ditertibkan. Tetapi, mengingat begitu kompleksnya persoalan maka untuk mengatasinya diperlukan serangkaian tindakan yang saling melengkapi. *Pertama*, berdasarkan karakteristiknya, pedagang asongan bukanlah tipe pedagang menetap karena sifatnya memang memburu pembeli dengan cara mengasongkan barang dagangannya. Makanya disebut pedagang asongan! Itu berarti penertiban pedagang asongan hanya dapat dilakukan dengan cara mengubah pola dari memburu pembeli ke mencegat pembeli.

Penyediaan lokasi penampungan haruslah berdekatan dengan pusat-pusat keramaian seperti terminal ataupun halte bus, stasiun kereta api, gedung bioskop dan sebagainya. Bukan memisahkannya. Intinya adalah bagaimana mereka dapat mencegat calon pembeli. Mereka dapat saja berdekatan dengan pedagang besar dan melakukan semacam *simboise mutualisma*. Pedagang besar menyediakan sedikit tempat di pojok kiri atau kanan tokonya, sementara itu pedagang asongan dapat juga berfungsi sebagai *satpam* yang membantu dalam mengawasi keamanan toko

dan tentunya juga harus menjaga kebersihan. Model seperti ini sebenarnya banyak kita jumpai. Di depan toko emas ada penjual rokok atau tukang rujak yang selain beruntung mendapat tempat mangkal juga berfungsi sebagai penjaga keamanan.

Sayangnya, daya tampung pedagang asongan model ini sangat terbatas. Tapi bukan tidak mungkin diperluas dengan cara melibatkan kantor-kantor, terutama kantor pemerintah, agar dapat menyisihkan sedikit ruangan di lobi sehingga para pedagang bisa mangkal. Atau merancang jembatan penyeberangan yang dapat menyisihkan sedikit tempat untuk pedagang asongan. Pak Domo bahkan mengusulkan agar kotak telepon umum yang rusak dapat dimanfaatkan sebagai warung pedagang asongan. Tapi perlu diingat bahwa penyediaan tempat tersebut tidak mengganggu ketertiban umum dan tidak disertai dengan pungutan yang berlebihan. Besarnya pungutan tersebut harus sedemikian rupa sehingga barang dagangannya tetap mampu bersaing. Jika tidak, mereka akan kembali lagi ke jalan.

Padagang asongan sekarang ini sudah begitu banyak jumlahnya sehingga upaya penertibannya harus disertai dengan kebijakan yang lebih makro. Untuk itu perlu dituntaskan sejak dari akar masalahnya, terutama yang menyangkut masalah lapangan kerja. Dari sisi ini, hal berikut yang perlu diperhatikan adalah usia para pedagang asongan itu. Bila mereka masih dalam usia sekolah, kembalikan saja mereka ke sekolah dan karena mereka umumnya tidak mampu perlu dicarikan orang tua asuh yang dapat membiayai sekolah mereka. Atau kalau perlu buka saja "dompet asongan" di media massa.

Bila di antara mereka ada yang sudah melewati batas usia sekolah, mereka perlu diberi pendidikan keterampilan sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Tentu saja pendidikan keterampilan tersebut haruslah disesuaikan dengan pasar kerja yang ada. Sebab, pada dasarnya bukan tidak ada lowongan kerja tapi sebenarnya sangat sedikit orang yang cocok untuk pekerjaan-pekerjaan yang ada. Di Jakarta, jenis pekerjaan sangat beragam dan nampaknya

akan terus berkembang. Ke arah inilah pendidikan keterampilan bagi pengasong mestinya diberikan.

Soal biaya pendidikan agaknya tidak terlalu sulit dicari. Departemen Tenaga Kerja baru saja memperoleh hibah dari UNDP (*United Nations Development Programme*) untuk pengembangan usaha mandiri melalui pendidikan keterampilan di BLK. Pihak pengusaha bisa juga dilibatkan dalam pembiayaan latihan keterampilan ini karena memang mereka juga butuh tenaga-tenaga yang terampil. Daripada susah-susah melatih karyawan, yang sudah bisa dipastikan tidak efisien kalau dikerjakan sendiri. Buktinya banyak usahawan yang bersedia menyumbang OEPH-nya Pak Domo. Bahkan sudah ada pengusaha yang membuka PO Box bagi pengasong yang ingin melamar kerja dan alih profesi.

Pembangunan pedesaan

Berikutnya, upaya menuntaskan masalah pedagang asongan ini mesti diarahkan pada masalah yang lebih mendasar, yaitu bagaimana me-

nahan arus migrasi ke kota-kota besar. Sebab, konon, sekitar 60 persen pedagang asongan bukan warga DKI. Memang, melalui OEPH, sebagai pedagang asongan yang bersedia pulang kampung sudah dibantu sekadar untuk ongkos. Tapi tentu saja masalahnya tidak cukup sampai di situ. Tanpa kesempatan kerja dan penghasilan yang memadai, mereka akan tergoda untuk kembali ke Jakarta.

Kalau benar para pengasong ini adalah mereka yang terlempar dari sektor tradisional tetapi tidak mampu menembus sektor industri modern, maka alternatif kebijakan yang sangat relevan adalah membangun daerah pedesaan dan kota-kota kecil melalui kegiatan yang dapat menjembatani sektor pertanian dan sektor industri. Misalnya dengan mengembangkan industri kecil yang mengolah hasil-hasil pertanian dan jasa-jasa penunjangnya.

Di sini perlu lebih ditekankan bahwa industri hasil pertanian tersebut dikembangkan dalam skala kecil. Mengingat dalam banyak hal dan pada berbagai tahap produksi, usaha ini akan lebih efisien jika dilakukan dalam skala kecil. Selain dapat menahan laju urbanisasi, pengembangan industri dalam skala kecil ini juga diharapkan sebagai suatu wahana penerapan teknologi yang dapat memadukan kecanggihan dengan kesempatan kerja yang lebih luas. Sehingga upaya ini mampu menyediakan lapangan kerja bagi mereka yang terlempar dari sektor pertanian namun belum berhasil menembus sektor industri modern.

Menertibkan pedagang asongan secara tuntas dan manusiawi memang tidak gampang. Sama tiak gampangya dengan membangun pedesaan. Untuk itu diperlukan adanya suatu kebijakan yang menyeluruh dan komprehensif. Sehingga penanganannya tidak dilakukan secara tambal sulam. Ibarat mengobati suatu penyakit, menghilangkan rasa sakitnya memang sangat manusiawi, tetapi mencari dan menghilangkan sumber penyakitnya, walaupun sulit dan mahal, tidak kalah pentingnya. Agar penyakit tersebut tidak selalu kumat. ***

Penulis, bekerja pada Kelompok Pengkajian Sistem Pedesaan Direktorat Pengkajian Sistem, BPP Teknologi.